

INTEGRASI KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DESA PENGLIPURAN, BALI

Ida Bagus Gede Paramita
STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja-Bali
ibgparamita@gmail.com

Abstract

This study examines the integration of Tri Hita Karana (THK) local wisdom in sustainable tourism management in Penglipuran Village, Bali. Using a qualitative case study approach, the research explores three THK dimensions Parahyangan (human-God relationship), Pawongan (interhuman harmony), and Palemahan (human-nature balance) as the foundation for community-based tourism governance. Findings reveal that THK is not merely a normative philosophy but is operationalized through rituals, collective labor (gotong royong), and environmental conservation. For instance, a 45-hectare bamboo forest serves as both a carbon sink and a tourist attraction, while customary laws (awig-awig) regulate waste management and spatial planning based on the Tri Mandala principle. Key challenges include globalization pressures on spiritual and ecological values, mitigated through tourist education and community-led adaptation. The study concludes that THK offers an integrative model for other cultural destinations, balancing economic, social, and environmental sustainability.

Keywords: Local wisdom, Tri Hita Karana, sustainable tourism, Penglipuran Village

Abstrak

Penelitian ini mengkaji integrasi kearifan lokal Tri Hita Karana (THK) dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Penglipuran, Bali. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi tiga dimensi THK *Parahyangan* (hubungan manusia-Tuhan), *Pawongan* (hubungan antarmanusia), dan *Palemahan* (hubungan manusia-alam) sebagai fondasi tata kelola pariwisata berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa THK tidak hanya menjadi filosofi normatif, tetapi juga dioperasionalkan melalui ritual adat, gotong royong, dan konservasi lingkungan. Misalnya, hutan bambu seluas 45 hektar berfungsi sebagai penyerap karbon sekaligus daya tarik wisata, sementara aturan adat (*awig-awig*) mengatur pengelolaan sampah dan tata ruang berbasis prinsip *Tri Mandala*. Tantangan utama meliputi tekanan globalisasi terhadap nilai spiritual dan ekologis, yang diatasi melalui edukasi wisatawan dan adaptasi berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa THK dapat menjadi model integratif untuk destinasi wisata budaya lainnya, dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata Kunci: Kearifan lokal, Tri Hita Karana, pariwisata berkelanjutan, Desa Penglipuran

1. Pendahuluan

Desa Penglipuran di Bangli telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu desa terbersih di dunia dan sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi hubungan timbal balik antara budaya lokal dan industri pariwisata. Desain tata ruang berdasarkan Tri Mandala dan Asta

Kosala Kosali, arsitektur seragam yang menampilkan egalitarianisme, serta keberadaan hutan bambu luas, menjadikan desa ini bukan sekadar objek wisata, tetapi juga subjek yang aktif memproduksi dan mereproduksi identitas kultural (Adi & Mulyadi, 2019). Perspektif ini memosisikan Penglipuran dalam kerangka *place-making*

yang melibatkan modal simbolik dan modal budaya (Bourdieu, 1990).

Penglipuran merepresentasikan Lefebvrian *production of space*, di mana ruang fisik tidak sekadar bersifat material, tetapi juga memuat lapisan simbolis dan representasional. Tata ruang Tri Mandala menandai hirarki kosmologis yang membentuk pola kehidupan masyarakat. Melalui Asta Kosala Kosali, rumah adat bukan hanya tempat tinggal tetapi juga ekspresi kosmos mini, memperlihatkan bagaimana masyarakat Bali memaknai ruang sebagai organisme hidup yang terkait erat dengan prinsip keseimbangan (Budiarta et al., 2024).

Hutan bambu seluas 45 hektare tidak hanya menjadi *green buffer zone* yang melindungi ekologi desa, tetapi juga sarat dengan nilai spiritual. Simbol bambu sebagai lambang kekuatan dan keluwesan memperkuat narasi *resilience* budaya yang menopang ketahanan masyarakat menghadapi tantangan eksternal. Hutan ini juga berfungsi sebagai sumber ekonomi mikro melalui produk kerajinan tangan dan wisata edukasi (Adi & Mulyadi, 2019), menegaskan konsep *eco-cultural tourism*.

Integrasi Tri Hita Karana (THK) dalam pengelolaan desa tidak hanya sebagai wacana normatif, tetapi dipraktikkan secara konkret dalam ritual, ekonomi, dan relasi sosial. Pendapatan wisata yang digunakan untuk pelestarian adat, gotong royong kebersihan desa, hingga pengelolaan limbah berbasis komunitas, semua menunjukkan operasionalisasi THK dalam membangun keberlanjutan multidimensional – ekologis, sosial, dan spiritual (Kirani et al., 2022). Ini selaras dengan teori pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya (Sharpley, 2009).

Penglipuran memperlihatkan kekuatan *bonding social capital* (Putnam, 2000) melalui mekanisme gotong royong yang mengikat masyarakat dalam solidaritas kolektif. Setiap anggota

masyarakat tidak hanya sebagai pelaku wisata tetapi juga penjaga warisan budaya. Model ini memperlihatkan bagaimana *community-based tourism* (CBT) dapat efektif jika didukung oleh institusi adat yang kuat dan kohesif, sekaligus memitigasi risiko konflik internal akibat distribusi keuntungan (Adi & Mulyadi, 2019).

Tekanan globalisasi yang memicu komodifikasi budaya direspon Penglipuran dengan menerapkan regulasi ketat atas aktivitas wisata. Larangan berpakaian sembarangan di zona suci dan kewajiban menghormati adat adalah contoh konkret *cultural gatekeeping* (Pradnyaparamita & Laksmi, 2019). Resistensi ini dapat dibaca melalui lensa teori Foucaultian tentang *governmentality*, di mana masyarakat memproduksi “aturan-aturan kultural” yang tidak hanya mengontrol wisatawan, tetapi juga mendisiplinkan warganya sendiri.

Pengelolaan pendapatan wisata dengan model desentralisasi memperlihatkan upaya konkret menuju ekonomi sirkular berbasis komunitas. Pendapatan tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok elite, tetapi didistribusikan untuk pembangunan fisik, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Ini memperkuat posisi Penglipuran sebagai contoh *equitable tourism development* yang meminimalkan kesenjangan ekonomi dalam desa (Kirani et al., 2022).

Meskipun terkesan konservatif, Penglipuran sebenarnya terus berinovasi. Wisata edukatif tentang pembuatan anyaman bambu, pengenalan ritual adat kepada wisatawan, dan digitalisasi promosi pariwisata memperlihatkan kemampuan adaptif yang tinggi. Ini mencerminkan apa yang disebut Appadurai (1996) sebagai *locality in flux*, yakni masyarakat lokal yang dinamis tetapi tetap mengakar.

Krisis pariwisata akibat pandemi COVID-19 mengungkap sisi rentan model ini. Ketergantungan pada pariwisata

membuat ekonomi desa sempat goyah. Budiarta et al. (2024) menyoroti perlunya diversifikasi ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai langkah antisipatif menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Ini menjadi pembelajaran bahwa keberlanjutan sejati memerlukan multi-sektor yang saling menopang.

Penelitian terdahulu banyak membahas peran THK atau partisipasi masyarakat secara parsial. Namun, sedikit yang menelaah *mekanisme integratif* yang memastikan harmonisasi berkelanjutan antara wisata dan kearifan lokal dalam situasi dinamis global. Studi ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif cultural studies, teori globalisasi, dan kerangka pembangunan berkelanjutan (Gede & Pradana, 2022), sehingga dapat memberikan model evaluasi holistik yang relevan untuk destinasi wisata budaya lainnya.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik untuk mendalami penerapan filosofi Tri Hita Karana dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Penglipuran. Metode ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara komprehensif dan kontekstual, sesuai dengan pandangan konstruktivisme sosial (Creswell, 2014), yang menekankan pentingnya memahami makna yang dibangun oleh aktor lokal. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi arsip dan kebijakan terkait. Sumber data primer mencakup masyarakat lokal, pengelola desa wisata, dan wisatawan, sementara data sekunder diperoleh dari laporan desa, kebijakan pariwisata, dan literatur akademik yang mendukung analisis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi praktik yang ada tetapi juga menganalisis dinamika

sosial, kultural, dan ekologis yang berlangsung di dalamnya.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan berdasarkan fokus penelitian, yaitu tiga dimensi utama Tri Hita Karana: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Data yang telah dirangkum kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan keterkaitan antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata. Untuk meningkatkan validitas hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan keandalan data. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan Desa Penglipuran dalam mempertahankan prinsip keberlanjutan berbasis kearifan lokal.

3. Pembahasan

3.1 Integrasi Kearifan Lokal (Tri Hita Karana) dalam pengelolaan Pariwisata Aspek Parhyangan

Konsep *Parahyangan* merupakan salah satu elemen fundamental dalam Tri Hita Karana, yang merepresentasikan filosofi keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan dalam kosmologi Hindu Bali (Ardhana & Surata, 2017). Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada tempat suci atau dimensi spiritual yang memperkuat hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Dalam praktik keseharian masyarakat Bali, *Parahyangan* berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan kosmis, memastikan bahwa kegiatan hidup tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga

memperhatikan dimensi spiritual (Pitana & Diarta, 2009).

Desa Penglipuran, sebagai desa adat yang dikenal dengan kebersihan dan ketertiban tata ruangnya, menerapkan prinsip *Parahyangan* secara nyata dalam struktur sosial dan arsitekturalnya. Tata ruang desa yang menempatkan pura di bagian utara sebagai pusat spiritual adalah manifestasi konkret dari upaya menjaga harmoni vertikal antara manusia dan Tuhan. Kompleks Pura Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Penataran Agung, Pura Puseh, dan Pura Dalem memegang fungsi penting dalam memfasilitasi upacara adat dan persembahyangan yang memperkuat identitas spiritual komunitas lokal (Windia & Sudiana, 2015).

Pelaksanaan ritual seperti *Ngusaba Nangkan* dan *Ngusaba Bantal* memperlihatkan betapa kuatnya integrasi antara kearifan lokal dan kalender adat Bali dalam menjaga kesinambungan tradisi (Ardika, 2018). Upacara *Ngusaba Nangkan*, yang dilaksanakan setiap Oktober sebagai bentuk syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, serta *Ngusaba Bantal* menjelang Hari Raya Nyepi, memperlihatkan bagaimana masyarakat memaknai siklus agraris dan kosmis sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Ritual ini tidak hanya memperkuat ikatan komunal tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang edukatif bagi wisatawan (Wiranatha et al., 2011).

Pura tidak hanya memiliki fungsi sakral tetapi juga sosial dan budaya. Melalui kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara rutin, masyarakat memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Astawa (2019), yang menyatakan bahwa pura dalam konteks desa adat berfungsi sebagai episentrum aktivitas budaya yang memelihara kesinambungan tradisi lintas generasi. Keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan keagamaan juga menjadi strategi regenerasi untuk memastikan keberlanjutan warisan budaya.

Dalam konteks pariwisata, pura-pura di Desa Penglipuran memiliki daya tarik yang unik. Selain sebagai objek wisata spiritual, tempat ini sering digunakan sebagai lokasi fotografi dan kegiatan budaya lainnya. Kendati demikian, pengelola desa memberlakukan aturan ketat bagi wisatawan untuk menjaga kesucian area suci selama upacara besar berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *community-based tourism* yang menempatkan kepentingan dan nilai-nilai lokal sebagai prioritas utama dalam pengembangan pariwisata (Suasta & Connor, 1999).

Pengelola wisata Desa Penglipuran juga mempraktikkan prinsip keberlanjutan dengan menyisihkan sebagian pendapatan pariwisata untuk mendukung pelaksanaan upacara adat. Hal ini menunjukkan sinergi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya lokal, sebagaimana diungkapkan oleh Cole (2007), yang menekankan bahwa pariwisata berbasis kearifan lokal mampu memperkuat ekonomi sekaligus menjaga integritas budaya masyarakat adat.

Edukasi bagi wisatawan menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan. Wisatawan tidak hanya diajak untuk menyaksikan keindahan fisik desa, tetapi juga diberi pemahaman mengenai filosofi Tri Hita Karana dan simbolisme budaya seperti penjor, yang melambangkan penghormatan terhadap alam dan kemakmuran (Suryawan, 2020). Upaya ini bertujuan agar wisatawan memperoleh pengalaman yang tidak hanya bersifat rekreatif tetapi juga transformatif, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai spiritual dan budaya Bali.

Selain itu, partisipasi wisatawan dalam kegiatan budaya seperti pembuatan canang sari memperlihatkan pendekatan *experiential tourism* yang menempatkan wisatawan sebagai peserta aktif dalam proses budaya. Sejalan dengan teori Richards & Raymond (2000), model ini memperkuat kualitas pengalaman wisata dan memperdalam pemahaman lintas

budaya, sekaligus menjadi media pelestarian tradisi lokal.

Desa Penglipuran telah membuktikan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan pengelolaan pariwisata dapat menciptakan harmoni antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi. Strategi yang diterapkan menjadi contoh praktik terbaik bagi destinasi lain yang ingin mengembangkan pariwisata berbasis budaya secara berkelanjutan (Agung, 2016).

Aspek Pawongan

Konsep *pawongan*, yang merujuk pada harmonisasi hubungan antarmanusia dalam kerangka Tri Hita Karana, diimplementasikan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan di Desa Wisata Penglipuran. Implementasi ini dapat diidentifikasi melalui tiga dimensi utama. Pertama, melalui partisipasi aktif masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan desa wisata. Kedua, melalui pola interaksi yang terjalin antara warga desa dan wisatawan, yang mencerminkan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap budaya. Ketiga, melalui mekanisme pengelolaan konflik sosial yang diterapkan untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam komunitas. Untuk mengkaji implementasi *pawongan* ini, penulis melakukan observasi partisipatif secara langsung di lapangan, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber, termasuk pengelola akun resmi Desa Wisata Penglipuran dan penduduk lokal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai praktik sosial budaya desa.

1. Partisipasi Masyarakat lokal

Partisipasi masyarakat lokal merupakan fondasi strategis dalam keberhasilan pengelolaan Desa Wisata Penglipuran, mencerminkan pendekatan pariwisata berbasis komunitas yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Seperti diungkapkan oleh I Nengah Sumindia,

hampir seluruh elemen masyarakat, mulai dari komunitas seka teruna hingga kelompok PKK, berperan aktif dalam berbagai aspek pengembangan wisata, memperlihatkan sinergi kolektif yang khas dalam struktur sosial Bali (Sumindia, wawancara pribadi, 2024). Partisipasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi terejawantah dalam praktik gotong royong yang dilakukan secara berkala, terutama menjelang musim kunjungan wisatawan. Aktivitas ini merefleksikan pengamalan nilai *pawongan* dalam Tri Hita Karana, yang menitikberatkan harmoni antar-manusia sebagai unsur esensial dalam menjaga keseimbangan sosial (Ardhana, 2015; Pitana & Gayatri, 2005). Pawongan dalam konteks ini tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi telah diinternalisasi menjadi praktik sehari-hari yang menopang keberlangsungan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Selain dari aspek gotong royong, keberpihakan terhadap penduduk lokal tampak jelas dalam kebijakan perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan warga desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ni Wayan Yuniastini, setiap kali terdapat lowongan pekerjaan di sektor wisata, informasi tersebut pertama-tama disebarluaskan di lingkungan lokal sebelum dibuka ke luar desa (Yuniastini, wawancara pribadi, 2024). Praktik ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan representasi konkret dari paradigma pemberdayaan yang memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pariwisata. Hal ini konsisten dengan temuan Kirani et al. (2022), yang mencatat adanya program pelatihan intensif bagi masyarakat Penglipuran, meliputi teknik produksi kerajinan, pemahaman nilai-nilai budaya lokal, hingga strategi pemasaran digital yang memanfaatkan media sosial sebagai kanal promosi yang efektif. Pendekatan ini relevan

dengan argumentasi Tosun (2006), yang menegaskan bahwa partisipasi lokal yang autentik adalah kunci dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dan mendorong pemerataan distribusi manfaat ekonomi.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemanduan wisata, penjualan produk lokal, serta produksi karya seni dan kuliner tradisional, memperlihatkan model ekonomi sirkular yang berakar kuat pada sistem nilai adat. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperkuat posisi masyarakat dalam rantai nilai ekonomi pariwisata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam konservasi budaya yang bersifat living heritage (Richards, 2018). Dengan demikian, Desa Wisata Penglipuran menunjukkan bagaimana kearifan lokal tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga dijadikan landasan strategis dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang inklusif.

2. Interaksi Antara Masyarakat dengan Wisatawan.

Interaksi antara wisatawan dan masyarakat Desa Wisata Penglipuran tidak hanya bersifat transaksional, tetapi lebih merupakan pertukaran sosial-budaya yang memperkaya kedua belah pihak. Model interaksi ini secara implisit mencerminkan pendekatan *experiential tourism*, di mana wisatawan diundang untuk memahami, mengalami, dan menghargai nilai-nilai budaya lokal secara langsung (Pine & Gilmore, 1999). Masyarakat desa secara aktif memfasilitasi pengalaman ini melalui berbagai kegiatan yang memungkinkan wisatawan terlibat, seperti mengikuti ritual adat, mempelajari teknik anyaman bambu, hingga berpartisipasi dalam aktivitas pertanian tradisional. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *co-creation of value* dalam kajian pariwisata, yang menekankan bahwa nilai pengalaman wisata terbentuk melalui kolaborasi aktif antara penyedia layanan

(masyarakat lokal) dan konsumen (wisatawan) (Pralhad & Ramaswamy, 2004).

Selain memperkaya pengalaman wisatawan, pola interaksi ini juga memperkuat mekanisme pelestarian budaya secara organik. Misalnya, setiap wisatawan yang mengikuti workshop kerajinan tangan tidak hanya memperoleh pengetahuan praktis, tetapi juga turut memvalidasi keberlanjutan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari ekonomi lokal. Seperti dicatat oleh Cohen (1988), dalam konteks pariwisata budaya, interaksi yang otentik dapat berfungsi sebagai media transmisi budaya yang efektif sekaligus memperkuat identitas lokal. Di Penglipuran, praktik ini diperkuat melalui protokol-protokol sosial yang menjunjung tinggi tata krama lokal seperti kewajiban mengenakan pakaian adat tertentu saat memasuki kawasan sacral yang sekaligus mendidik wisatawan tentang norma dan etika lokal.

Menariknya, interaksi ini juga memperlihatkan dinamika adaptasi budaya yang bersifat dialogis. Masyarakat tidak hanya menjadi "penerima" wisatawan, tetapi juga memanfaatkan umpan balik dan pengaruh wisatawan untuk memperbaharui praktik budaya secara selektif tanpa mengorbankan substansi nilai adat. Fenomena ini mengingatkan pada pandangan Hannerz (1996) tentang *creolization*, di mana kontak antarbudaya memunculkan bentuk-bentuk baru yang bersifat adaptif dan inovatif. Di Penglipuran, bentuk adaptasi tersebut tampak, misalnya, dalam penyajian kuliner tradisional yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan mancanegara, tanpa menghilangkan esensi rasa dan teknik memasaknya.

Dalam perspektif keberlanjutan, interaksi yang berlandaskan saling menghormati ini memperkuat triple bottom line pariwisata: keuntungan ekonomi, pelestarian budaya, dan keseimbangan sosial (Elkington, 1997). Dengan demikian, interaksi antara

wisatawan dan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran bukan hanya menjadi sarana hiburan semata, melainkan forum pendidikan lintas budaya yang memperdalam makna pariwisata sebagai jembatan dialog peradaban.

2. Pengelolaan Konflik Sosial

Dalam konteks pengembangan desa wisata, potensi konflik antara masyarakat lokal, wisatawan, dan pihak pengelola merupakan fenomena yang kerap terjadi, terutama akibat perbedaan kepentingan, ekspektasi, serta ketimpangan informasi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme resolusi konflik yang adaptif dan partisipatif menjadi esensial untuk memastikan kolaborasi yang harmonis di antara seluruh pemangku kepentingan. Salah satu strategi utama adalah penguatan komunikasi yang bersifat transparan dan berkelanjutan. Pengelola desa wisata memiliki tanggung jawab untuk secara berkala menyosialisasikan kebijakan, rencana pengembangan, dan dinamika pariwisata kepada masyarakat lokal. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip *community-based tourism* yang menekankan perlunya keterbukaan informasi untuk menciptakan rasa memiliki dan mencegah miskomunikasi yang berpotensi memicu konflik (Murphy & Murphy, 2004; Suansri, 2003).

Selain aspek komunikasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan desa wisata juga merupakan komponen krusial. Partisipasi yang otentik memungkinkan pengelola untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat identitas lokal dalam desain wisata yang ditawarkan. Seperti diungkapkan oleh Tosun (2006), partisipasi masyarakat bukan hanya berperan dalam meningkatkan legitimasi proyek pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap potensi konflik yang bersumber dari ketidakpuasan warga lokal. Di Bali, prinsip kearifan lokal seperti *awig-awig*—hukum

adat yang mengatur tatanan sosial dan tata kelola sumber daya—dapat dijadikan pedoman dalam memastikan bahwa pengelolaan pariwisata tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang lestari (Ardhana, 2015).

Lebih jauh, upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing wisata berbasis komunitas. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ekonomi, seperti pemanduan wisata atau produksi kerajinan, tetapi juga menanamkan pemahaman tentang pentingnya konservasi budaya dan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang hadir tanpa mengorbankan kelestarian identitas budaya lokal dan alam sekitar, sebagaimana ditekankan oleh Scheyvens (1999) dalam model pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata.

Terakhir, pembentukan forum dialog terbuka yang melibatkan masyarakat lokal, wisatawan, dan pengelola menjadi salah satu pendekatan deliberatif yang efektif dalam mengelola konflik. Forum ini menyediakan ruang yang inklusif untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta merumuskan solusi bersama yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya merefleksikan prinsip demokrasi partisipatif, tetapi juga mengaktualisasikan konsep *desa mawacara*, yakni musyawarah mufakat yang menjadi salah satu fondasi dalam kearifan lokal Bali (Suardana & Pitana, 2019). Dengan implementasi yang konsisten terhadap langkah-langkah tersebut, pengelolaan desa wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menciptakan ekosistem pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

Aspek Pelemahan

Desa Penglipuran merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam

pengelolaan lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan desa ini dalam mempertahankan lanskap hijau dan kebersihan lingkungan tidak terlepas dari peran aktif masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi leluhur. Salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat tercermin melalui kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan pertanian, tetapi juga memainkan peran penting dalam konservasi lingkungan melalui penerapan pertanian berkelanjutan yang berpijak pada nilai-nilai lokal (Rai et al., 2021).

Kearifan lokal masyarakat Penglipuran berakar dari warisan budaya penduduk asli Bayunggede. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam sistem hukum adat (*awig-awig*) yang mengatur perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi instrumen normatif yang efektif dalam menginternalisasi kesadaran ekologis masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan adat yang ketat mampu menumbuhkan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan (Suardana, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam pengelolaan lingkungan.

Salah satu bentuk nyata penerapan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan adalah sistem pengelolaan sampah yang berbasis *awig-awig*. Masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan, dan hal ini ditegakkan melalui sanksi adat. Pada masa lalu, metode tradisional seperti penggunaan lubang pembuangan yang ditutup bambu digunakan untuk menjaga estetika dan menghindari pencemaran. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan, sistem modern diperkenalkan untuk mendukung efisiensi pengelolaan limbah domestik. Kerja sama dengan Dinas Lingkungan

Hidup menjadi bukti sinergi antara praktik lokal dan pendekatan kelembagaan modern (Widhiastini & Yuliarmi, 2020).

Komitmen masyarakat terhadap kebersihan juga diwujudkan dalam edukasi bagi wisatawan. Sebelum memasuki desa, pengunjung diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kebersihan melalui pengarahannya langsung maupun papan informasi yang tersebar di seluruh kawasan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan wisatawan, tetapi juga memperkuat citra desa sebagai destinasi ramah lingkungan (Pitana, 2009). Kegiatan rutin seperti membersihkan halaman setiap pagi bukan sekadar kebiasaan, tetapi menjadi bagian dari etos kolektif yang memperkuat relasi sosial sekaligus lingkungan.

Dalam konteks tata ruang dan arsitektur, Desa Penglipuran mengadopsi prinsip Tri Mandala dan Asta Kosala Kosali, yang merupakan fondasi filosofis dalam perencanaan ruang di Bali. Prinsip Tri Mandala membagi ruang menjadi tiga bagian – utama mandala (ruang suci), madya mandala (ruang sosial), dan nista mandala (ruang profan) – yang mencerminkan hierarki nilai spiritual dan sosial masyarakat Bali (Ardika, 2011). Sementara itu, Asta Kosala Kosali mengatur struktur fisik rumah secara simbolik dan fungsional. Kombinasi keduanya menghasilkan tata ruang desa yang harmonis dan efisien, sekaligus mencerminkan identitas budaya yang kuat (Yuliani, 2019).

Keberhasilan Desa Penglipuran dalam mengintegrasikan pariwisata dengan kearifan lokal juga ditunjukkan melalui pengelolaan hutan bambu seluas 45 hektare. Hutan ini bukan hanya elemen estetika, tetapi berfungsi sebagai kawasan resapan air, penghasil oksigen, serta sumber bahan baku kerajinan tradisional. Pengelolaan berbasis komunitas terhadap hutan ini memperlihatkan bagaimana modal sosial dan nilai adat dapat bersinergi dalam upaya konservasi (Suarmawan, 2017). Hutan bambu menjadi

aset ekologis sekaligus ekonomi yang menopang pariwisata berkelanjutan.

Kegiatan tahunan seperti pameran budaya dan kuliner desa, termasuk promosi produk lokal seperti *loloh cencem*, kerajinan tangan, dan pertunjukan seni, memperlihatkan bahwa pariwisata di desa ini tidak bersifat eksploitatif. Sebaliknya, desa ini memosisikan budaya sebagai daya tarik utama yang dipelihara dengan prinsip keberlanjutan. Keterlibatan aktif warga dalam seluruh proses pelaksanaan acara menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan lingkungan bukan tugas eksternal, melainkan bagian dari tanggung jawab komunal (Nuryanti, 1993; Astawa & Wiranatha, 2015).

Secara keseluruhan, Desa Penglipuran telah menjadi laboratorium hidup dalam praktik ekowisata berbasis komunitas yang berakar pada kearifan lokal. Model ini menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis nilai dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan desa ini dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam merancang strategi pengembangan pariwisata yang tidak hanya mengutamakan profit ekonomi, tetapi juga pelestarian budaya dan lingkungan.

Dampak Penerapan Tri Hita Karana terhadap Pelestarian Budaya, Sosial, dan Lingkungan

1. Pelestarian Budaya melalui Dimensi Parahyangan

Konsep *Tri Hita Karana* dalam dimensi *Parahyangan* menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Di Desa Penglipuran, hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan upacara keagamaan secara rutin di pura-pura desa seperti *Pura Penataran*, *Pura Dalem*, dan *Pura Desa*. Upacara-upacara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi nilai-nilai budaya dan identitas lokal dari generasi ke generasi (Suarda, Rai, & Puspa, 2017). Dalam konteks pariwisata, keberlanjutan pelaksanaan upacara adat ini memperkuat

daya tarik budaya bagi wisatawan yang mencari pengalaman otentik, sembari mempertahankan esensi budaya Bali yang sakral. Dengan demikian, kearifan lokal dalam bentuk ritual keagamaan tradisional dapat menjadi pilar dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya (Picard, 1996; Ramstedt, 2004).

2. Penguatan Ikatan Sosial melalui Dimensi Pawongan

Aspek *Pawongan* dalam *Tri Hita Karana* merujuk pada keharmonisan hubungan antar manusia. Di Desa Penglipuran, nilai ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan sosial seperti *gotong royong*, *sangkep desa* (rapat musyawarah), dan partisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Kehadiran struktur sosial adat yang inklusif memungkinkan setiap warga desa terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Hal ini memperkuat kohesi sosial dan menciptakan tata kelola yang demokratis berbasis nilai lokal (Wijaya & Pitana, 2016). Kolaborasi antarwarga dalam merawat kebersihan desa, memandu wisatawan, serta menjaga keamanan lingkungan menjadi cerminan dari *modal sosial* yang tinggi, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan pariwisata (Putnam, 2000; Suarmawan, 2017).

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Sosial-Ekonomi

Partisipasi aktif masyarakat dalam sistem pengelolaan pariwisata juga menunjukkan bentuk konkrit dari pemberdayaan berbasis nilai lokal. Penerapan *Tri Hita Karana* tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk berdaya secara ekonomi dan sosial. Pemerataan manfaat ekonomi dari pariwisata dicapai melalui sistem rotasi dalam penugasan warga sebagai pemandu, pengelola tiket, dan penjual produk lokal, sehingga tidak terjadi monopoli oleh kelompok tertentu (Darma

Putra & Hitchcock, 2009). Selain itu, pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas pariwisata dan lembaga adat untuk meningkatkan kapasitas warga menjadi strategi adaptif agar masyarakat lokal mampu mengelola pariwisata dengan tetap menjaga nilai dan norma tradisional (Yuliarmi, 2020). Keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian nilai budaya inilah yang menjadi inti dari pariwisata berbasis kearifan lokal.

4. Konservasi Lingkungan melalui Dimensi Palemahan

Dimensi *Palemahan*, yang menekankan harmoni antara manusia dan alam, menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan di Desa Penglipuran. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan sampah berbasis rumah tangga, konservasi tanaman lokal, serta pelestarian hutan bambu yang menjadi identitas ekologis desa. Hutan bambu seluas ±45 hektare tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon dan pengendali iklim mikro, tetapi juga sebagai sumber ekonomi dari hasil kerajinan bambu yang dijual kepada wisatawan (Ardika, 2011; Suarmawan, 2017). Tata ruang desa yang mengikuti prinsip *Tri Mandala* dan *Asta Kosala Kosali* menciptakan struktur permukiman yang ekologis dan estetis, di mana arsitektur rumah dibangun dengan bahan lokal dan ramah lingkungan (Windia & Sudita, 2013). Upaya pelestarian ini tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas lokal sebagai destinasi wisata yang berwawasan ekologis.

5. Implementasi Kearifan Lokal sebagai Strategi Pengelolaan Pariwisata

Desa Penglipuran membuktikan bahwa pengelolaan pariwisata tidak harus bertumpu pada model pembangunan konvensional yang mengejar keuntungan ekonomi semata. Sebaliknya, desa ini mengedepankan nilai-nilai lokal sebagai basis kebijakan dan praktik pengelolaan

destinasi. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan aturan kunjungan, pelestarian budaya, dan pelaksanaan wisata edukatif menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan sebagai instrumen manajemen pariwisata yang efektif (Cole, 2007). Konsep *Tri Hita Karana* menjadi kerangka etis sekaligus operasional dalam menciptakan pariwisata yang inklusif, lestari, dan berakar pada budaya lokal. Oleh karena itu, pendekatan ini layak dijadikan model alternatif dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat di wilayah lain di Indonesia.

3.3 Tantangan dalam Mempertahankan Prinsip Tri Hita Karana di Era Globalisasi Tantangan dalam Aspek Parahyangan: Harmonisasi Ritual dan Aktivitas Wisata

Prinsip Parahyangan dalam Tri Hita Karana yang menekankan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan menghadapi dinamika baru di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata di Desa Penglipuran. Masyarakat setempat tetap melaksanakan berbagai bentuk yadnya harian seperti saiban dan sembahyang di merajan, namun pelaksanaannya kini sering kali disesuaikan dengan ritme kunjungan wisatawan. Ketika aktivitas persembahyangan bersifat wajib, masyarakat bahkan menghentikan sementara aliran wisata untuk menjaga kesucian ritual (Suarma, 2022). Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptif masyarakat dalam mengintegrasikan praktik spiritual dengan kebutuhan industri pariwisata tanpa mengorbankan nilai sakralitas upacara.

Piodalan, sebagai bentuk yadnya besar, justru menjadi atraksi budaya yang menarik perhatian wisatawan. Namun, eksposur ini memunculkan tantangan tersendiri, seperti gangguan dalam prosesi melasti yang disebabkan oleh kehadiran wisatawan yang kurang memahami etika lokal. Situasi ini mendorong aparat desa dan pengelola wisata untuk meningkatkan literasi budaya kepada pengunjung

melalui papan informasi maupun pendamping wisata (Yudarta & Adnyani, 2021). Dengan demikian, strategi pengelolaan berbasis kearifan lokal perlu dilengkapi dengan pendekatan edukatif agar keberlangsungan ritual keagamaan tetap terjaga dalam konteks wisata.

Tantangan dalam Aspek *Pawongan*: Dinamika Sosial dan Transformasi Nilai

Aspek *Pawongan* yang menekankan harmoni antarumat manusia menjadi landasan penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah arus globalisasi. Di Desa Penglipuran, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata menunjukkan bentuk nyata dari model partisipatif berbasis lokal. Aktivitas harian seperti membersihkan telajakan oleh ibu-ibu sebelum desa dibuka untuk wisatawan mencerminkan bentuk kontribusi sukarela yang dipengaruhi oleh nilai-nilai komunal (Artayasa, 2020). Dalam hal ini, gotong royong tetap menjadi prinsip operasional dalam menjaga citra desa sebagai destinasi yang bersih dan ramah.

Namun demikian, modernisasi telah mengubah sebagian pola hidup masyarakat. Di balik rumah tradisional yang dilestarikan, terdapat bagian rumah yang telah dimodifikasi secara modern. Meskipun demikian, komitmen untuk mempertahankan elemen-elemen sakral seperti angkul-angkul, bale sekenam, dan dapur Bali tetap dijaga sebagai identitas budaya yang otentik. Interaksi yang penuh toleransi, seperti kesediaan penduduk menyediakan ruang ibadah bagi wisatawan non-Hindu, menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat mendukung praktik pariwisata yang inklusif dan multikultural (Rai, 2021).

Tantangan dalam Aspek *Palemahan*: Kelestarian Lingkungan dan Tuntutan Ekonomi

Prinsip *Palemahan* yang mengatur hubungan manusia dengan alam menjadi dasar dari praktik ekowisata di Desa Penglipuran. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan setiap tahun, desa

menghadapi tekanan terhadap sumber daya alam, namun berhasil menjawabnya dengan pendekatan yang berbasis kearifan lokal. Masyarakat mengelola limbah, memelihara tanaman lokal, dan menerapkan konsep “desa bebas sampah” sebagai strategi pelestarian lingkungan yang partisipatif (Sudarsana, 2023). Penggunaan material lokal dalam konstruksi dan desain arsitektur tradisional juga mencerminkan prinsip keberlanjutan yang inheren dalam budaya Bali.

Selain itu, dampak ekonomi dari pariwisata tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat motivasi kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak warga kini menjadi pelaku usaha wisata seperti pemandu, pengrajin, atau pengelola homestay berbasis ekologi. Proses ini memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam praktik ekonomi pariwisata mampu membangun kesadaran ekologis yang lebih kuat (Wijaya & Mahayasa, 2022). Dengan demikian, Desa Penglipuran menjadi model bagaimana prinsip *Palemahan* dalam Tri Hita Karana dapat diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan.

4. Simpulan

Desa Penglipuran membuktikan kearifan lokal Tri Hita Karana (THK) mampu menjadi pondasi pariwisata berkelanjutan yang harmonis. Dalam dimensi spiritual (*Parahyangan*), ritual adat seperti Ngusaba Nangkan tidak hanya menjadi media penghubung dengan Tuhan, tetapi juga daya tarik wisata yang terjaga kesuciannya melalui aturan adat ketat. Pendapatan pariwisata pun dialokasikan untuk melestarikan tradisi, menciptakan sinergi antara nilai spiritual dan ekonomi.

Di bidang sosial (*Pawongan*), gotong royong dan musyawarah menjadi tulang punggung pengelolaan desa, dengan masyarakat sebagai pelaku aktif pariwisata. Sistem rotasi pekerjaan

menjamin pemerataan manfaat ekonomi, sementara interaksi dengan wisatawan dibangun atas dasar saling menghormati. Aspek lingkungan (Palemahan) diwujudkan melalui hutan bambu seluas 45 hektare yang berfungsi ganda sebagai penjaga ekosistem dan sumber ekonomi, serta pengelolaan sampah berbasis adat yang efektif.

Meski menghadapi tantangan globalisasi, Penglipuran menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan mungkin dilakukan tanpa mengorbankan identitas budaya. Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi penerapan aturan adat, edukasi wisatawan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Model ini patut menjadi rujukan bagi destinasi wisata lain di Indonesia yang ingin memadukan pelestarian budaya dengan pembangunan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Adi, I. K. R., & Mulyadi, L. (2019). Cultural resilience and tourism: The case of Penglipuran Village, Bali. *Journal of Heritage Tourism*, 14(3), 234-248. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2018.1563102>
- Ardhana, I. K., & Surata, S. P. K. (2017). Tri Hita Karana and sustainable tourism development in Bali. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5(2), 45-56.
- Astawa, I. N. (2019). The role of temples in preserving Balinese culture. *Bali Tourism Journal*, 3(1), 12-25.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Budiarta, I. W., Suryawan, I. N., & Putra, I. N. D. (2024). *Space production and cultural resilience in Balinese traditional villages*. Udayana University Press.
- Cole, S. (2007). *Tourism, culture and development: Hopes, dreams and realities in East Indonesia*. Channel View Publications.
- Darma Putra, I. N., & Hitchcock, M. (2009). *Tourism, development and terrorism in Bali*. Routledge.
- Gelebet, I. N. (1986). *Arsitektur tradisional Bali* [Traditional Balinese architecture]. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Bali.
- Kirani, A. D., Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2022). Community-based tourism and equitable development in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(5), 1123-1140. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1922426>
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata* [Introduction to tourism science]. Andi Offset.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rai, I. B., Suarta, I. M., & Puspa, I. G. A. (2017). Cultural transmission through rituals in Balinese villages. *Journal of Bali Studies*, 7(2), 145-160.
- Sharpley, R. (2009). *Tourism development and the environment: Beyond sustainability?* Earthscan.
- Suardana, I. W., & Pitana, I. G. (2019). *Awig-awig: Traditional law in modern Bali*. Udayana University Press.
- Suryawan, I. N. (2020). *Symbolism in Balinese cultural landscape*. Pustaka Larasan.

- Widhiastini, N. M. A., & Yuliarmi, N. N. (2020). Waste management based on local wisdom in Bali. *Journal of Environmental Management*, 265, 110507. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110507>
- Windia, W., & Sudiana, I. G. N. (2015). *Tri Hita Karana in Balinese life*. Pustaka Bali Post.
- Wiranatha, A. S., Antara, M., & Pitana, I. G. (2011). *Tourism and cultural preservation in Bali*. Udayana University Press.
- Yuliani, N. L. (2019). Balinese traditional architecture in modern times. *Journal of Asian Architecture*, 18(3), 345-360.